

ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP) PADA KOPERASI CU (*CREDIT UNION*) DAYA LESTARI DI SAMARINDA

Oleh :

YOHANES JUAN HUVAT

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945

Email : anesssmd@gmail.com.

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menyusun penerapan (SAK ETAP) terhadap laporan keuangan dikoperasi CU Daya Lestari Tahun 2015. Akuntansi keuangan adalah suatu pencatatan transaksi dalam suatu perusahaan atau unit ekonomi yang menyangkut penyusunan berbagai laporan keuangan secara periodik dalam catatan-catatan tersebut, dimana hasilnya terutama ditujukan pada pemakai yang diluar perusahaan (pemakai ekstern) yang masing-masing mempunyai kepentingan yang berbeda. Dari uraian rumusan masalah dan dasar teori yang digunakan maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut : “Koperasi CU Daya Lestari telah menerapkan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP) terhadap laporan keuangan tahun 2015”. Alat analisis pada penelitian ini menggunakan metode deskripsi komperatif yaitu metode dengan cara mendeskripsikan perlakuan akuntansi pada standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP) dan mendeskripsikan perlakuan akuntansi koperasi CU Daya Lestari Samarinda selanjutnya membandingkan dan mengukur tingkat kesesuaiannya. Sebagai dasar untuk analisis, maka disajikan pada laporan keuangan koperasi simpan pinjam CU Daya Lestari disamarinda dalam bentuk laporan neraca, perhitungan SHU, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan pada tahun 2015.

Berdasarkan perhitungan skor kesesuaian penerapan SAK ETAP terhadap koperasi CU Daya Lestari Samarinda tahun 2015 maka dapat disimpulkan bahwa 94% tingkat kesesuaiannya Berdasarkan pengujian hipotesis BAB III maka tingkat kesesuaian 94% adalah kurang dari 100% mengindikasikan Hipotesis Ditolak.

Kata kunci : SAK ETAP, Laporan Keuangan.

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip - prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, dengan demikian koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional. Tidak dapat dipungkiri bahwa koperasi adalah badan usaha

yang kelahirannya dilandasi oleh pemikiran sebagai usaha kumpulan orang-orang bukan kumpulan modal.

Bagi sebuah koperasi hal yang terpenting adalah usaha untuk meningkatkan efisiensi modal kerja, karena modal kerja adalah modal yang selalu berputar dalam koprasi dan setiap perputaran akan menghasilkan aliran pendapatan (*current income*) yang dapat berguna bagi koperasi, masalah modal kerja juga erat hubunganya dengan kegiatan operasi sehari-hari.

Tingkat modal kerja koperasi dapat dilihat melalui analisis sumber dan penggunaan modal kerja, karena dengan melakukan analisis tersebut dapat mengetahui bagaimana koperasi mengalami penurunan atau kenaikan modal kerja, penyebab dari kenaikan dan penurunan dapat diketahui dengan bagaimana koperasi menggunakan dana yang dimilikinya.

Berbagai jenis koperasi berkembang dengan pesat seperti koperasi Pegawai Negeri, Koperasi Unit Desa, Koperasi serba usaha, bahkan hingga koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam telah memberikan ciri khusus dengan tujuan yang membantu para pengusaha kecil dalam menyediakan permodalan tanpa anggunan.

Credit Union Daya Lestari Samarinda merupakan sebuah lembaga keuangan yang berdomisili di Samarinda yang bergerak di bidang simpan pinjam yang dimiliki dan dikelola oleh anggotanya, kegiatan simpan pinjam ini meliputi pinjaman kepada anggota koperasi maupun masyarakat umum dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya sendiri.

Sesuai surat edaran Deputi Kelembagaan Koperasi UKM Nomor : 200/SE/Dept.1/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011 bahwa sehubungan pemberlakuan IFRS, maka entitas Koperasi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangannya mengacu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) yaitu :

1. Diperuntukkan bagi entitas tanpa akuntabilitas publik signifikan.
2. Pengaturannya lebih sederhana, mengatur transaksi umum yang tidak kompleks.
3. Perbedaan dengan PSAK No. 27 tahun 1998 tidak ada kewajiban Koperasi menyusun dan menyajikan Laporan Promosi Ekonomi Anggota (LPEA), dan
4. Laporan keuangan dengan ETAP, yaitu Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas laporan keuangan (lihat halaman 17 SAK ETAP).

Penelitian tentang penerapan SAK ETAP pada koperasi telah banyak dilakukan. Seperti halnya pada penelitian Andreas (20xx) dalam penelitiannya yang berjudul “Evaluasi

Atas Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Laporan Keuangan Koperasi Di Kota Bandar Lampung (Studi Kasus Pada KPRI di Kota Bandar Lampung)”.

Selanjutnya juga dilakukan oleh Mulyani (20xx) dengan judul Penelitian yakni “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Koperasi Mandiri Jaya Tanjung pinang Dan Koperasi Karyawan Plaza Hotel Tanjung pinang”. Hasil penelitian menyatakan bahwa laporan keuangan koperasi mandiri jaya dan koperasi karyawan plaza tidak sesuai SAK ETAP.

Hal yang sama juga dilakukan oleh Setyaningsih (20xx) pada skripsinya dengan judul “Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS) Makmur Batang Di Jl.Raya Banyuputih No.314 Batang”. Hasil Penelitiannya adalah Laporan keuangan KSPS Makmur Batang belum sesuai SAK ETAP, karena

- a. Penyajian : kebijakan akuntansi hanya mengacu UU Perkoperasian Pasal 37 ayat (1) dan hanya menyajikan secara komparatif untuk laporan neraca.
- b. Pengukuran : (1) dasar perhitungan dan umur ekonomis aktiva tetap tidak sesuai SAK ETAP,serta gedung untuk tahun 2012-2013 tidak disusutkan ; dan (2) pembagian SHU tidak disajikan pada laporan neraca keuangan.
- c. Tidak menyajikan laporan arus kas
- d. Tidak menyajikan laporan perubahan ekuitas
- e. Unsur-unsur CALK : tidak menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang digunakan

2. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini : “Apakah Laporan Keuangan Koperasi CU Daya Lestari pada tahun 2015 sudah menerapkan Standar Akuntansi

Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)” Tahun 2013 ?

3. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menyusun penerapan (SAK ETAP) terhadap Laporan Keuangan di koperasi CU Daya Lestari Tahun 2015.

LANDASAN TEORI

A. Akuntansi Keuangan

1. Pengertian Akuntansi Keuangan

Akuntansi keuangan merupakan alat untuk menginformasikan mengenai data keuangan dan data perusahaan kepada pihak yang berkepentingan. Hal yang penting untuk diperhatikan dalam menyusun laporan keuangan untuk pihak berkepentingan adalah aturan-aturan yang telah disetujui bersama prinsip-prinsip akuntansi. Pakar akuntansi mengemukakan definisi-definisi sebagai berikut :

Menurut (Donald E, Kieso dkk, 2002 : 3) Akuntansi keuangan (*financial accounting*) adalah “Sebuah proses berakhir pada pembuatan laporan keuangan menyangkut perusahaan secara keseluruhan untuk digunakan baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal”. Menurut (Soemarso, 2002:18) “Akuntansi keuangan adalah “bidang akuntansi yang berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan secara berkala untuk sesuai unit ekonomi secara keseluruhan kepada pihak-pihak di luar perusahaan”.

2. Manfaat Akuntansi Keuangan

Akuntansi keuangan mempunyai tujuan untuk menyajikan informasi keuangan bagi pemakai diluar perusahaan, contohnya seperti pemegang saham, kreditor, analis keuangan, karyawan, instansi pemerintah dan lainnya.

1. Laporan Keuangan

a. Pengertian Laporan Keuangan

Weston dan Copeland dalam Oktorina dan Suharli (2005) menyatakan : “Laporan keuangan merupakan kartu angka untuk mencatat dan mengevaluasi kinerja suatu organisasi. Oleh karena itu, laporan keuangan itu penting bagi manajemen organisasi yang efisien”.

Selain itu, Imdieke dan Smith dalam buku *Financial Accounting* (2000) mendefinisikan laporan keuangan sebagai berikut.

The final result of the accounting process is the preparation of various financial statements that serve as important communication devices. These financial statements are generally classified into two types : internal and external statements.

b. Komponen-Komponen Laporan Keuangan

Menurut PSAK No. 1 tentang penyajian laporan keuangan paragraf 07-09, laporan keuangan yang lengkap terdiri dari lima komponen, yaitu Neraca, Laporan Laba-Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Namun, jika diperlukan perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan, seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*).

2. Koperasi

a. Pengertian Koperasi

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 (2007:27.1), pengertian koperasi adalah :

Badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas

dasar prinsip-prinsip koperasi pada kaidah ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya, dengan demikian koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional.

Dari pengertian tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa koperasi merupakan kumpulan dari orang-orang yang memiliki keinginan dan tujuan yang sama, yaitu memberikan manfaat bagi anggota—anggotanya demi tercapainya kesejahteraan anggota.

b. Fungsi dan Peran Koperasi

Fungsi dan peran Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian :

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya,
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat,
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya,
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

c. Prinsip Koperasi

Menurut Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut :

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- b. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis
- c. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi
- d. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen
- e. Koperasi harus mengadakan pelatihan kepada anggota, pengawas dan karyawan serta memberikan jati diri kegiatan dan pemanfaatan koperasi
- f. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi dengan kerjasama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional
- g. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan dengan di sepakati oleh anggota.

d. Akuntansi Koperasi

1) Pengertian Akuntansi Koperasi

Akuntansi Koperasi adalah sistem pencatatan yang sistematis yang mencerminkan pengelolaan koperasi yang transparan dan bertanggungjawab sesuai dengan nilai, norma dan prinsip koperasi.

2) Laporan Keuangan Koperasi

a) Ketentuan Umum

Mengingat pemakai laporan keuangan koperasi adalah anggota koperasi, pengurus,

pengawas serta stakeholder lain (pemerintah, kreditur dan pihak lain yang berkepentingan) maka laporan keuangan harus memenuhi ketentuan dalam penyajian kualitatif laporan keuangan. Karakteristik yang bersifat spesifik dari laporan keuangan koperasi diantaranya adalah :

- (1) Laporan keuangan merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban pengurus selama satu periode akuntansi, yang dapat dipakai sebagai bahan untuk menilai hasil kerja pengelolaan koperasi,
- (2) Laporan keuangan koperasi merupakan bagian dari sistem pelaporan koperasi yang ditujukan untuk pihak internal maupun eksternal koperasi,
- (3) Laporan keuangan koperasi harus berdayaguna bagi para anggotanya, sehingga pihak anggota dapat menilai manfaat ekonomi yang diberikan koperasi dan berguna juga untuk mengetahui :
 - (a) Prestasi unit kegiatan koperasi yang secara khusus bertugas memberikan pelayanan kepada para anggotanya selama satu periode akuntansi tertentu,
 - (b) Prestasi unit kegiatan koperasi yang secara khusus ditujukan untuk tujuan bisnis dengan nonanggota selama satu periode akuntansi tertentu,
 - (c) Informasi penting lainnya yang mempengaruhi keadaan keuangan koperasi jangka pendek dan jangka panjang.

b) Komponen laporan keuangan koperasi

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Pasal 35, disebutkan bahwa setelah tahun buku Koperasi ditutup, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakan rapat anggota tahunan, Pengurus menyusun laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya :

- 1) Neraca,

- 2) Perhitungan Hasil Usaha, dan
- 3) Catatan Atas Laporan Keuangan

Dalam pedoman umum akuntansi koperasi ini, komponen laporan keuangan dilengkapi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), yaitu : laporan perubahan ekuitas (modal) dan laporan arus kas.

c) Tujuan laporan keuangan koperasi

Tujuan laporan keuangan koperasi adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan informasi yang bermanfaat bagi pengelola, anggota koperasi dan pengguna lainnya dalam pengambilan keputusan.

3) Akuntansi Koperasi

a. Jenis Transaksi Pada Koperasi.

- 1) Transaksi antara koperasi dengan anggotanya terdiri dari :
 - a) Transaksi setoran, dapat berbentuk :
 - (1) Setoran modal yang menentukan kepemilikan (simpanan pokok, simpanan wajib),
 - (2) Setoran lain yang tidak menentukan kepemilikan (misal: simpanan sukarela, tabungan, simpanan berjangka dan simpanan lainnya).
 - b) Transaksi pelayanan, dapat berbentuk :
 - (1) Pelayanan dalam bentuk kegiatan penyaluran dan pengadaan barang/jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota,
 - (2) Menyediakan dan menyalurkan kebutuhan input bagi :
 - (a) kegiatan proses produksi usaha anggota,
 - (b) Pelayanan penyaluran barang/jasa yang dihasilkan anggota untuk dipasarkan,
 - (c) Pengelolaan kegiatan simpan pinjam anggota.
- 2) Transaksi antara koperasi dengan nonanggota, dapat berbentuk :

- a) Penjualan barang/jasa kepada nonanggota atau masyarakat umum/perusahaan,
 - b) Pembelian barang/jasa dari nonanggota.
- 3) Transaksi khusus pada koperasi, dapat berbentuk :
- a) Penerimaan dan pengembalian modal penyertaan untuk kegiatan usaha/proyek dari anggota atau pihak lain,
 - b) Penerimaan modal sumbangan (hibah/donasi) dari anggota atau pihak lain,
 - c) Pengalokasian “beban perkoperasian”,
 - d) Pembentukan cadangan.
 - e) Pengakuan dan Pengukuran (Perlakuan), Penyajian dan Pengungkapan.

Dalam penerapan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dilakukan proses pengakuan dan pengukuran (perlakuan), penyajian dan pengungkapan dari setiap transaksi dan perkiraan atas kejadian akuntansi pada koperasi, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Pengakuan merupakan proses pembentukan suatu pos/akun dalam neraca atau laporan perhitungan hasil usaha (PHU) yang mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur, dimana manfaat ekonomi yang
- 2) berkaitan dengan perkiraan tersebut, akan mengalir dari atau ke dalam koperasi,
- 3) Pengukuran merupakan proses penetapan jumlah uang yang digunakan oleh koperasi untuk mengukur nilai aset, kewajiban, pendapatan, dan beban dalam laporan keuangan,
- 4) Penyajian merupakan proses penempatan pos/akun (perkiraan) dalam laporan keuangan secara tepat dan wajar,
- 5) Pengungkapan adalah pemberian informasi tambahan yang dibutuhkan untuk menjelaskan unsur-unsur pos/akun (perkiraan) kepada pihak yang berkepentingan sebagai catatan dalam laporan keuangan koperasi.

Tujuan dari pernyataan tersebut diatas adalah agar penerapan akuntansi dapat

dilakukan oleh koperasi secara terukur, tepat, wajar dan konsisten, sehingga laporan keuangan yang disajikan benar, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

B. SAK ETAP Koperasi

1) Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

Menurut SAK ETAP (2009:1), Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang :

- a) Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan, dan
 - b) Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pengusaha yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.
- Entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan jika:
- a) Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek dipasar modal, atau
 - b) Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana, dan bank investasi.

Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang mengizinkan penggunaan SAK ETAP.

2) Tujuan Laporan Keuangan menurut SAK ETAP

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumberdaya yang dipercayakan kepadanya. (SAK ETAP 2009:2)

3) Karakteristik Kualitatif Informasi dalam Laporan Keuangan SAK ETAP

Karakteristik Kualitatif Informasi dalam Laporan Keuangan berdasarkan SAK ETAP (SAK ETAP, 2009 :6-9)

a. Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Untuk maksud ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan yang wajar.

Namun demikian, kepentingan agar laporan keuangan dapat dipahami tetapi tidak sesuai dengan informasi yang relevan harus diabaikan dengan pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pengguna tertentu.

b. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan dengan kebutuhan pengguna untuk proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna

dengan cara membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu.

c. Materialitas

Informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi tertentu dari kelalaian dalam mencantumkan (*omission*) atau kesalahan dalam mencatat (*misstatement*).

Namun demikian, tidak tepat membuat atau membiarkan kesalahan untuk menyimpang secara tidak material dari SAK ETAP agar mencapai penyajian tertentu dari posisi keuangan, kinerja keuangan atau arus kas suatu entitas.

d. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus andal. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan material dan bias, dan penyajian secara jujur apa yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

e. Substansi Mengungguli bentuk

Transaksi, peristiwa dan kondisi lain dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Hal ini untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan.

f. Pertimbangan Sehat

Ketidakpastian yang tidak dapat diabaikan meliputi berbagai peristiwa dan keadaan yang dipahami berdasarkan pengungkapan sifat dan penjelasan peristiwa dan keadaan tersebut dan melalui penggunaan pertimbangan sehat dalam menyusun laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau beban tidak disajikan lebih rendah.

Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan pembentukan aset atau penghasilan yang lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban yang lebih tinggi. Singkatnya, pertimbangan sehat tidak mengijinkan bias.

g. Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan kurang mencukupi ditinjau dari segi relevansi.

h. Dapat Dibandingkan

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif.

i. Tepat Waktu

Agar relevan, informasi dalam laporan keuangan harus dapat mempengaruhi

keputusan ekonomi para penggunanya. Tepat waktu meliputi penyediaan informasi laporan keuangan dalam jangka waktu pengambilan keputusan. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya.

Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan secara relative antara pelaporan tepat waktu dan penyediaan informasi yang andal. Untuk mencapai keseimbangan antara relevansi dan keandalan, maka pertimbangan utama adalah bagaimana yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam mengambil keputusan ekonomi.

j. Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat

k.

Manfaat informasi seharusnya melebihi biaya penyediannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya tersebut juga tidak perlu ditanggung oleh pengguna yang menikmati manfaat. Dalam evaluasi manfaat dan biaya, entitas memahami bahwa manfaat informasi mungkin juga manfaat yang dinikmati oleh pengguna eksternal.

4) Penyajian Laporan Keuangan SAK ETAP

SAK ETAP menjelaskan penyajian laporan keuangan secara wajar kedalam sub bagian, sebagai berikut (SAK ETAP 2009:14-18) :

a. Penyajian Wajar

Laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas suatu entitas. Penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang

sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, kewajiban, penghasilan dan beban.

b. Kepatuhan Terhadap SAK ETAP

Entitas yang laporan keuangannya mematuhi SAK ETAP harus membuat pernyataan eksplisit dan secara penuh (*explicit and unreserved statement*) atas kepatuhan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan.

c. Kelangsungan usaha

Pada saat menyusun laporan keuangan, manajemen entitas yang menggunakan SAK ETAP membuat penilaian atas kemampuan entitas melanjutkan kelangsungan usahanya.

d. Frekuensi Pelaporan

Entitas menyajikan secara lengkap laporan keuangan, termasuk informasi komparatif minimum satu tahun sekali

e. Penyajian yang Konsisten

Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten kecuali jika terjadi perubahan yang signifikan atas sifat operasi entitas atau perubahan penyajian atau pengklasifikasian bertujuan menghasilkan penyajian lebih baik sesuai kriteria pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi.

f. Informasi Komparatif

Informasi harus diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya kecuali dinyatakan lain oleh SAK ETAP (termasuk informasi dalam laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan).

g. Materialitas dan Agregasi

Pos-pos yang material disajikan secara terpisah dalam laporan keuangan sedangkan yang tidak material digabungkan dengan jumlah yang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis.

h. Laporan Keuangan Lengkap

Laporan keuangan entitas meliputi :

- 1) Neraca
- 2) Laporan laba rugi
- 3) Laporan perubahan ekuitas yang juga menunjukkan:
 - a) Seluruh perubahan dalam ekuitas, atau
 - b) Perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pengusaha dalam kapasitasnya sebagai pengusaha,
- 4) Laporan arus kas
- 5) Catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

i. Identifikasi Laporan Keuangan

Entitas harus mengidentifikasi secara jelas setiap komponen laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan. Jika laporan keuangan merupakan komponen dari laporan lain, maka laporan keuangan harus dibedakan dari informasi lain dalam laporan tersebut.

5) Laporan Keuangan SAK ETAP

a. Neraca

Neraca merupakan laporan keuangan yang menyajikan aset, kewajiban dan ekuitas suatu entitas pada suatu tanggal tertentu atau akhir periode pelaporan. Neraca minimal mencakup pos-pos : kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya, persediaan, properti investasi, aset tetap, aset tidak berwujud, utang usaha dan utang lainnya, aset

dan kewajiban pajak, kewajiban kewajiban diestimasi, ekuitas.

Entitas menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya dalam neraca jika penyajian seperti itu relevan dalam rangka pemahaman terhadap posisi keuangan entitas. SAK ETAP tidak menentukan format atau urutan terhadap pos-pos yang disajikan (SAK ETAP, 2009:19).

b. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi memasukkan semua pos penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode kecuali SAK ETAP menyaratkan lain. SAK ETAP mengatur perlakuan berbeda terhadap dampak koreksi atas kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi yang disajikan sebagai penyesuaian terhadap periode yang lalu dan bukan sebagai bagian dari laba atau rugi dalam periode terjadinya perubahan.

Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos : pendapatan, beban keuangan, bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas, beban pajak, dan laba atau rugi neto. Entitas harus menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya pada laporan laba rugi jika penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan entitas. Selain itu entitas tidak boleh menyajikan atau mengungkapkan pos pendapatan dan beban sebagai “pos luar biasa”, baik dalam laporan laba rugi maupun dalam catatan atas laporan keuangan. (SAK ETAP, 2009: 23).

c. Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba

1) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan laba atau rugi entitas untuk periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh

perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut, dan (tergantung pada format laporan perubahan ekuitas yang dipilih oleh entitas) jumlah investasi oleh, dan deviden dan distribusi lain ke pengusaha ekuitas selama periode tersebut. (SAK ETAP, 2009: 26).

2) Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba

Laporan laba rugi dan saldo laba menyajikan laba atau rugi entitas dan perubahan saldo laba untuk suatu periode pelaporan. Entitas menyajikan laporan laba rugi dan saldo laba menggantikan laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas jika perubahan pada ekuitas hanya berasal dari laba atau rugi, pembayaran deviden, koreksi kesalahan periode lalu, dan perubahan kebijakan akuntansi (SAK ETAP, 2009: 27).

d. Laporan Arus Kas

Entitas menyajikan laporan arus kas yang melaporkan arus kas untuk suatu periode dan mengklasifikasikan menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan (SAK ETAP, 2009: 28).

1) Pelaporan Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan entitas. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa dan kondisi lain yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi. Entitas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode tidak langsung.

Dalam metode ini laba atau rugi neto disesuaikan dengan mengoreksi dampak dari transaksi non kas,

penangguhan atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi dimasa lalu dan masa depan, dan unsur penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan. (SAK ETAP, 2009:30)

2) Pelaporan Arus Kas dari Aktivitas Investasi dan Pendanaan

Entitas melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto yang berasal dari aktivitas investasi dan pendanaan. Jumlah agregat arus kas yang berasal dari akuisisi dan pelepasan entitas anak atau unit usaha lain disajikan secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi (SAK ETAP, 2009: 31)

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan (SAK ETAP, 2009: 34).

Alat Analisis

1. Teknik Alat Analisis

Alat analisis pada penelitian ini menggunakan metode deskripsi komperatif yaitu metode dengan cara mendeskripsikan perlakuan akuntansi pada standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP) dan mendeskripsikan perlakuan akuntansi koperasi CU Daya Lestari Samarinda selanjutnya membandingkan dan mengukur tingkat kesesuaiannya.

a. SAK ETAP Koperasi Tahun 2013

1) Penyajian

a) Penyajian Wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

b) Kepatuhan Terhadap SAK ETAP TAHUN 2013

Entitas yang laporan keuangannya mematuhi SAK ETAP harus membuat suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh atas kepatuhan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan.

c) Kelangsungan usaha

Dalam menyusun laporan keuangan, manajemen membuat penilaian tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usaha. Entitas menyusun laporan keuangan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, kecuali manajemen bertujuan untuk melikuidasi entitas atau menghentikan perdagangan, atau tidak mempunyai alternatif lainnya yang realistis selain melakukannya.

d) Frekuensi pelaporan

Entitas menyajikan laporan keuangan lengkap (termasuk informasi komparatif) setidaknya secara tahunan. Jika akhir periode pelaporan entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan untuk periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari periode satu tahun, sebagai tambahan terhadap periode cakupan laporan keuangan, maka entitas mengungkapkan :

- (1) alasan penggunaan periode pelaporan yang lebih panjang atau lebih pendek, dan
- (2) fakta bahwa jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan tidak dapat diperbandingkan secara keseluruhan.

e) Penyajian yang konsisten

Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten kecuali:

- (1) Setelah terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi entitas atau review atas laporan keuangan, terlihat secara jelas bahwa penyajian atau pengklasifikasian yang lain akan lebih tepat untuk digunakan dengan mempertimbangkan kriteria untuk penentuan dan penerapan kebijakan akuntansi dalam PSAK 25, atau
- (2) perubahan tersebut diperkenankan oleh suatu PSAK.

Pendapatan komprehensif lain berisi pos-pos pendapatan dan beban (termasuk penyesuaian reklasifikasi) yang tidak diakui dalam laba rugi dari laporan pendapatan komprehensif sebagaimana dipersyaratkan oleh SAK lainnya. Komponen pendapatan komprehensif lain meliputi :

- (1) perubahan dalam surplus revaluasi
- (2) keuntungan dan kerugian aktuarial atas program manfaat pasti yang diakui sesuai dengan paragraf 94 PSAK 24 : Imbalan Kerja
- (3) keuntungan dan kerugian yang timbul dari penjabaran laporan keuangan dari entitas asing
- (4) keuntungan dan kerugian dari pengukuran kembali asset keuangan yang dikategorikan sebagai 'tersedia untuk dijual'
- (5) Bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrument lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas.

f) Informasi komparatif

Informasi kuantitatif diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya untuk seluruh jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan periode berjalan, kecuali dinyatakan lain oleh SAK. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan

periode sebelumnya diungkapkan kembali jika relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

g) Materialitas dan agregasi

Entitas menyajikan secara terpisah kelompok pos sejenis yang material. Entitas menyajikan secara terpisah pos yang mempunyai sifat atau fungsi berbeda kecuali pos tersebut tidak material. Laporan keuangan merupakan hasil dari pemrosesan sejumlah transaksi atau peristiwa lain yang diklasifikasikan sesuai sifat atau fungsinya.

Tahap akhir dari proses penggabungan dan pengklasifikasian adalah penyajian dalam laporan keuangan. Jika suatu klasifikasi pos tidak material, maka dapat digabungkan dengan pos lain yang sejenis dalam laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan. Suatu pos mungkin tidak cukup material untuk disajikan terpisah dalam laporan keuangan tetapi cukup material untuk disajikan terpisah dalam catatan atas laporan keuangan.

2) Pengukuran

a) Berbasis akrual

Basis Akrual adalah “penyandingan pendapatan dan biaya pada periode di saat terjadinya”, bukan pencatatan pada saat pendapatan tersebut diterima ataupun biaya tersebut dibayarkan (*Cash Basis*).

b) Biaya Historis

Suatu ukuran berharga yang digunakan akuntansi di mana harga suatu asset pada atas sisanya didasarkan pada biaya yang asli atau nominalnya ketika diperoleh oleh suatu perusahaan. Metoda Biaya historis digunakan untuk asset dibawah prinsip akuntansi berlaku umum.

c) Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga di mana aset dapat dibeli atau dijual dalam transaksi kini antar pihak secara

sukarela, yaitu bukan penjualan paksa atau likuidasi. Harga pasar di pasar aktif adalah bukti terbaik dari nilai wajar dan harus digunakan sebagai dasar untuk pengukuran, jika tersedia. Jika harga pasar tidak tersedia, estimasi nilai wajar harus didasarkan pada informasi terbaik yang tersedia dengan mempertimbangkan harga aset sejenis dan hasil teknik penilaian.

Contoh teknik penilaian termasuk nilai sekarang dari estimasi kas masa depan yang diharapkan mengalir dengan menggunakan tingkat diskonto yang sepadan dengan risiko yang terlibat, *option-pricing* model, dan analisis *fundamental*.

3) Unsur-Unsur Laporan Neraca Keuangan

- a) Kas Dan Setara Kas
- b) Piutang Usaha Dan Piutang Lainnya
- c) Persediaan
- d) Properti Investasi
- e) Aset Tetap
- f) Aset tidak berwujud
- g) Utang usaha dan utang lainnya
- h) Aset dan kewajiban pajak
- i) Kewajiban diestimasi
- j) Ekuitas

4) Unsur-Unsur Perhitungan Sisa Hasil Usaha

- a) Pendapatan
- b) Beban keuangan
- c) Bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas
- d) Beban pajak
- e) Laba atau rugi neto

5) Unsur-Unsur Laporan Arus Kas

6) Unsur-Unsur Laporan Perubahan Ekuitas

7) Unsur-Unsur Catatan Atas Laporan Keuangan

- a) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang digunakan
- b) Mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam SAK ETAP tetapi tidak disajikan dalam laporan keuangan

- c) Memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan.

B. Pembahasan

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada subbab sebelumnya maka dapat terlihat komponen yang tidak sesuai dengan SAK ETAP pada unsur laporan neraca terletak pada akun pajak penghasilan. Hal tersebut sejalan dengan keterangan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan yang diterima oleh penulis dalam melakukan penelitian.

Koperasi CU Daya Lestari Samarinda tidak mencatat kewajiban pajak dikarenakan koperasi belum terdaftar sebagai wajib pajak. Sementara dalam SAK ETAP bab 24 mengakui adanya kewajiban pajak.

Oleh karena itu, penulis membuat neraca komparatif dengan tujuan untuk menggambarkan laporan neraca koperasi menurut SAK ETAP dengan asumsi bahwa pajak terhutang pada tahun sebelumnya diakui sebagai kewajiban pajak tahun ini dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Kewajiban Pajak} &= 10\% \times \text{SHU Tahun 2014} \\ &= 10\% \times \text{Rp. 972.404.258} \\ &= \text{Rp. 97.240.426}\end{aligned}$$

Pada tabel terlihat bahwa kewajiban pajak telah tercatat dalam laporan komparatif menurut SAK ETAP yang secara langsung juga mengurangi Kas dan Setara Kas koperasi CU Daya Lestari Samarinda sehingga mengubah Total Aset koperasi yang bernilai Rp. 923.573.937.554 menjadi Rp. 923.476.687.128

Pembahasan selanjutnya akan menjelaskan laporan Sisa Hasil Usaha komparatif. Berdasarkan analisis pada subbab sebelumnya maka dapat terlihat komponen yang tidak sesuai dengan SAK ETAP pada unsur laporan sisa hasil usaha terdapat pada akun pajak penghasilan sebagai yang terlihat pada hasil penelitian bahwa koperasi CU Daya Lestari Samarinda tidak mencatat pajak

penghasilan tahun berjalan pada laporan sisa hasil usaha.

Koperasi CU Daya Lestari Samarinda tidak mencatat pajak penghasilan dikarenakan koperasi belum terdaftar sebagai wajib pajak. Sementara dalam SAK ETAP bab 24 mengakui adanya pajak berjalan yang harus dibayarkan oleh pihak koperasi. Oleh karena itu, penulis membuat laporan sisa hasil usaha komparatif dengan tujuan untuk menggambarkan laporan sisa hasil usaha koperasi menurut SAK ETAP dengan asumsi bahwa koperasi telah membayar pajak tahun berjalan.

Perhitungan pajak penghasilan menggunakan rumus berikut :

$$\begin{aligned}\text{Pajak Penghasilan} &= 10\% \times \text{SHU Tahun 2015} \\ &= 10\% \times \text{Rp. 1.204.592.436} \\ &= \text{Rp. 120.459.244}\end{aligned}$$

Pada tabel tersebut terlihat bahwa pajak penghasilan telah tercatat dalam laporan komparatif menurut SAK ETAP yang secara langsung juga mengurangi SHU koperasi CU Daya Lestari Samarinda sehingga mengubah Sisa hasil usaha koperasi yang bernilai Rp. 1.204.592.436 menjadi Rp. 1.084.133.192

Berdasarkan Analisis dan Pembahasan di atas maka dapat disimpulkan jumlah point-point yang sesuai dengan SAK ETAP dan dapat diukur tingkat kesesuaiannya sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Perhitungan skor sesuai} &= \frac{47}{50} \times 100\% \\ &= 94\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Perhitungan skor tidak sesuai} &= \frac{3}{50} \times 100\% \\ &= 6\%\end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan skor kesesuaian penerapan SAK ETAP terhadap koperasi CU Daya Lestari Samarinda tahun 2015 maka dapat disimpulkan bahwa 94% tingkat kesesuaiannya. Berdasarkan pengujian hipotesis BAB III maka tingkat kesesuaian 90% adalah kurang dari 100% mengindikasikan **Hipotesis Ditolak**.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan adalah koperasi CU Daya Lestari telah menerapkan standar akuntansi keuangan tahun 2015 hipotesis ditolak. Secara umum koperasi CU Daya Lestari Samarinda sudah menerapkan SAK ETAP pada laporan keuangan dengan tingkat kesesuaian sebesar 94%. Komponen-komponen yang masih belum sesuai dengan SAK ETAP terdiri atas laporan pajak penghasilan, aset dan kewajiban pajak dan beban pajak. Hal-hal yang tidak sesuai itu telah dijelaskan pada laporan keuangan koperasi CU Daya Lestari Samarinda yang menyatakan bahwa koperasi belum terdaftar sebagai wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Andreas, Beth Sianne. 2013. *Evaluasi Atas Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Sak Etap) Pada Laporan Keuangan Koperasi Di Kota Bandar Lampung (Studi Kasus Pada KPRI di Kota Bandar Lampung)*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Andriani, L., Atmadja, A.T., & Sinarwati, N.K. 2014. *Analisis Penerapan Pencatatan Keuangan Berbasis SAK ETAP pada UMKM (Sebuah studi intrepetatif pada Peggy Salon)*. *Jurnal Pendidikan & Pengajaran (JPP)*, Vol. 2 (1): 1-12
- Anonim, 2012. *Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 04/Per/M.Kukm/Vii/2012 Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia*, Republik Indonesia, Jakarta
- _____, 1992. *Undang-Undang Republik Indonesia No 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian*. Sekretariat Negara Republik Indonesia

- _____. 2009. *Peluncuran Standar Akuntansi syariah dan Standar Akuntansi ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.. Majalah Akuntansi Indonesia*, Malang, 17-18 Juli
- _____. 2013. *Standar Akuntansi keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. : Ikatan Akuntan Indonesia*. Jakarta.
- _____. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Entitas Akuntabilitas Publik : Penerbit IAI*. Jakarta.
- _____. 2010. *Exposure Draft Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan No 27 tentang Akuntansi Perkoperasian*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan
- Chariri, A. 2012. *Paduan Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik: Ilustrasi Laporan Keuangan PT ETAP Indonesia*. Jakarta: IAPI
- Kurniasari, Yessi. 2015. *Analisis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Sak Etap) Pada Laporan Keuangan Koperasi (Studi Kasus Pada Koperasi Kesejahteraan Lingkungan Hikmat Pelita Manonjaya Tasikmalaya)*. Universitas Siliwangi Tasikmalaya
- Minarni Eni, Krisan Sisdiyantoro. 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Standarakuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Studi Empiris Pada Koperasi Di Kabupaten Tulungagung)*. Universitas Tulungagung
- Mulyani. 2013. *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Sak Etap) Pada Koperasi Mandiri Jaya Tanjungpinang Dan Koperasi Karyawan Plaza Hotel Tanjungpinang*. Universitas Maritim Raja Ali Haji
- Rudianto. 2008. *Akuntansi Koperasi: Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*. PT Grasindo, Jakarta.
- Oktaritama, Edningsari Dewi. 2015. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Bagian Akuntansi Koperasi Atas Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Sak Etap) (Studi Kasus Pada Koperasi Di Kabupaten Purworejo)*. Universitas Diponegoro. Semarang
- Setyaningsih, Ida Ayu. 2014. *Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Sak Etap) Pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah (Ksps)*.